

Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia – **CONVEY Indonesia**

Policy Brief Series

Issue 12 | Vol. 1 | 2018

This Policy Brief series is published as part of CONVEY Indonesia project organized by PPIM UIN Jakarta and UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia aims to build peace in Indonesia and to prevent violent extremism and radicalism through a series of research-survey, policy advocacy, and public interaction based on the potential of religious education.

CONVEY Indonesia project covers on the issues of tolerance, diversity, and non-violence among youth

Rehabilitasi Korban: Belajar dari Mantan Aktivis NII, GAFATAR, dan Deportasi/Returni ISIS

Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC)

Pesan-pesan Kunci:

- Mantan aktivis gerakan Negara Islam Indonesia (NII) teridentifikasi secara signifikan menjadi pelaku aksi-aksi terorisme di Indonesia. Banyak kasus menunjukkan, ketika seseorang keluar dari NII, jalan hidup selanjutnya adalah terlibat dalam jaringan terorisme. Oleh karena itu intervensi dari pemerintah atau program reintegrasi ke dalam lingkungan masyarakat yang moderat sangat disarankan.
- Kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) bukanlah kelompok pro-kekerasan. Kelompok ini mempunyai perhatian pada isu ketahanan pangan. Gafatar menjadi isu nasional setelah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dituduh akan melakukan makar terhadap pemerintah. Fatwa sesat dan tuduhan makar tersebut berakibat pada munculnya sikap dan aksi kekerasan masyarakat terhadap para anggotanya dan hak-hak konstitusinya pun terampas. Dalam kasus Gafatar, penting kiranya membahas reparasi termasuk pengembalian hak korban dan pemulihan stigma yang beredar di masyarakat, serta utamanya bagaimana pemerintah menangani kasus seperti ini.
- Kelompok ISIS adalah kelompok yang berbahaya. Karena propagandanya atas nama Islam, kelompok ini telah menarik perhatian umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan “hijrah” ke Suriah dan bergabung dengan kelompok militan di sana. Beberapa di antara mereka ada yang dideportasi (deportan) sebelum sampai ke sana dan beberapa di antara mereka ada yang sudah sampai ke sana, kemudian kembali lagi ke Indonesia (returni).
- Pemerintah sejauh ini hanya melakukan respon tanggap darurat terhadap isu-isu seperti di atas, dimana tidak ada program keberlanjutan yang bisa diukur tingkat keberhasilan atau kegagalannya, sehingga program yang dilakukan hanya sebatas program rutin tahunan yang setiap tahun pasti diulang dengan metode yang sama. Kerjasama dengan berbagai pihak diperlukan untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk tokoh-tokoh agama moderat untuk merespon ajaran-ajaran Islam yang digunakan dalam propaganda kelompok radikal juga ekstremis seperti ISIS dan NII.

Latar Belakang

Sejak 1999 hingga 2013, banyak pelaku terorisme dan aksi bom bunuh diri yang jika dilihat jejak ideologinya adalah anggota atau mantan aktivis NII. Mereka umumnya merupakan bagian yang tidak puas dengan aktivitas NII yang belum menunjukkan perubahan signifikan dalam upayanya mendirikan negara Islam. Imam Samudra dan Mukhlis adalah contoh dari bagian yang dimaksud. Keduanya adalah pelaku utama bom Bali pada 12 Oktober 2002. Selain itu, Iwan Darmawan, pelaku bom di

Kedutaan Australia pada 9 September 2004 juga pernah aktif di NII wilayah Banten. Iwan kini adalah pendukung ISIS bersama Aman Abdurahman, yang awalnya dari gerakan Salafi sebelum kemudian bertransformasi menjadi kelompok jihadis dan akhirnya pendukung ISIS.

NII bukan sebuah organisasi yang monolitik. Setidaknya ada dua bagian penting dalam faksi NII, yakni NII Teritori dan NII non-Teritori. NII Teritori adalah kelompok yang mengklaim masih terhubung dengan imam NII pertama yakni Kartosoewirjo. Faksi ini dipegang oleh Panji

Gumilang alias Abu Toto. Mereka disebut NII Teritori karena kelompok ini memiliki daerah operasi (teritori) yang jelas, seperti Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Kelompok ini juga dikenal sebagai NII KW9 yang telah mengalami metamorfosis gerakannya.

Sementara itu, NII non-Teritori adalah faksi NII yang tidak memiliki daerah operasi yang jelas. Kelompok ini dipercaya memiliki banyak aktivis yang bermigrasi ke kelompok Islam pro-kekerasan (teroris). Kelompok yang dipimpin Abu Umar, kelompok bom buku Pepi Fernando, kelompok Santoso Daeng Koro, dan pelaku Bom Kuningan Heri Gulun merupakan contoh dari kelompok ini. Selain itu, kelompok ini juga telah melakukan percampuran dengan ideologi yang lain seperti Salafi, Ikhwanul Muslimin, dan Syi'ah.

Namun bukan berarti tidak ada anggota kelompok NII KW 9 yang berpindah ke kelompok teroris. Contohnya adalah pelaku bom di depan kedutaan Australia bernama Iwan Darmawan alias Rois (mantan NII Banten) dan pelaku bom Wihara bernama Miko (mantan NII Jember). Kelompok Iwan juga dikenal dengan sebutan Ring Banten. Kelompok ini memisahkan diri dari NII KW9 yang kemudian terlibat dalam jaringan teroris yang dipimpin oleh Dulmatin dalam pelatihan militer di Jonto, Aceh pada 2010.

Kasus lain yang menarik dari NII KW 9 adalah Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) dan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) atau lebih dikenal dengan ISIS. Terkait hal ini, NII KW 9 bukanlah kelompok yang dipercayai sebagai kelompok pro-kekerasan kecuali oleh para mantan aktivisnya. Kelompok ini menggunakan agama sebagai alat untuk pengumpulan uang atas nama infak dan sodaqoh untuk membangun negara Islam di Indonesia.

Gafatar juga tidak termasuk kelompok pro-kekerasan. Kelompok ini fokus bergerak pada usaha-usaha ketahanan pangan dan menjalankan hidup keberagamaan. Keberadaan kelompok ini menjadi isu nasional ketika dinyatakan sesat dan menyalahi Islam arus utama oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dituduh akan melakukan makar pada pemerintah. Anggotanya kemudian mendapatkan aksi kekerasan secara masif dan hak-hak konstitusinya diabaikan, bahkan sampai saat ini.

Sementara ISIS dianggap sebagai kelompok yang paling berbahaya terutama atas propagandanya menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan Islam. Kelompok ini secara masif melakukan persuasi kepada umat muslim di seluruh dunia untuk bergabung dan berhijrah ke Suriah. Beberapa di antara mereka ada yang dideportasi sebelum sampai ke Suriah. Tetapi beberapa yang lain di antaranya ada yang sudah sampai, namun memilih untuk kembali lagi ke Indonesia. ISIS sebagaimana dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Agustus 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Pada 11 Oktober 2014, pemerintah Indonesia melalui pengadilan juga menyatakan ISIS sebagai organisasi terlarang dan teroris.

Policy Brief ini hendak mengurai bagaimana para mantan aktivis, deportan dan returni sebelumnya tertarik untuk bergabung dengan kelompok-kelompok di atas. Selanjutnya tulisan ini menggambarkan bagaimana mereka keluar atau memisahkan diri dari kelompok tersebut.

Metodologi

Kajian ini didasarkan pada hasil penelitian mengenai riset kebijakan untuk rehabilitasi mantan aktivis NII, Gafatar, serta deportan dan returni ISIS oleh IMCC (2017). Pemilihan subyek dalam penelitian ini didasarkan pada; pertama, NII diteliti karena kelompok ini dipandang berkontribusi cukup signifikan dalam sejumlah aksi terorisme di Indonesia, bahkan banyak dari mantan anggotanya menjadi aktor kunci dalam beberapa gerakan terorisme besar. Riset menitikberatkan pada orang-orang yang terlibat dan bagaimana mereka keluar dari kelompok NII KW9 serta bagaimana selanjutnya mereka melakukan reintegrasi sosial secara mandiri.

Kedua, Gafatar diteliti karena terdapat keganjilan dalam cara pemerintah menangani kelompok ini. Terutama setelah maraknya kasus dan pemberitaan soal pengusiran kelompok ini yang dituduhkan sesat oleh MUI dan dikhawatirkan akan melakukan makar oleh pemerintah dari beberapa wilayah perkumpulannya termasuk yang terakhir di Kalimantan Barat (2016). Namun pada akhirnya pun tuduhan makar tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Sementara stigmatisasi

Gafatar sebagai kelompok berbahaya dari hasil *framing* media sebelumnya masih belum pulih dan pemerintah pun juga belum melakukan reparasi terhadap fenomena ini.

Ketiga adalah ISIS, kelompok yang sedia menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya dan mengatasnamakan agama. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkirakan 800-1000 orang Indonesia telah berangkat ke Suriah dan bergabung dengan kelompok militan pada kurun waktu 2014-2016. Sementara hingga Desember 2017, jumlah yang sudah dideportasi dan sudah mengikuti program rehabilitasi dari pemerintah hanya berjumlah 240 orang, sedangkan returni hanya sekitar 18 orang. Perbedaan dari dua entitas ini adalah deportan masih memiliki keinginan untuk pindah ke Suriah dan tinggal di bawah naungan negara Islam, sementara returni tidak lagi memiliki keinginan tersebut, bahkan banyak di antaranya mereka sangat kecewa dengan realita yang bertolak belakang dengan gambaran indah yang mereka dapatkan dari internet.

Ketiga kelompok yang menjadi subyek penelitian ini umumnya seringkali dikaitkan satu dengan yang lainnya. Padahal sebetulnya latar belakang dan profil mereka yang terlibat tidak linier satu sama lain bahkan tidak sama sekali. Sebagai contoh adalah kasus deportan Triyono, seorang pegawai Kementerian Keuangan yang kemudian berhenti dari pekerjaannya demi bergabung dengan ISIS di Suriah, namun dideportasi oleh pemerintahan Turki pada 2017 lalu. Ada pula mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Depok-Jawa Barat, Dody Riyanto (2000-2013) yang bergabung dengan ISIS. Baik Triyono maupun Dody, keduanya tidak memiliki latar belakang kelompok radikal sebelumnya.

Riset dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara terstruktur dan kajian literatur. Fokus riset menekankan pada pertanyaan bagaimana mereka sebelumnya terlibat dan keluar dari kelompoknya. Responden yang diwawancarai berjumlah 46 orang, dengan komposisi 20 eks-NII, 16 eks-Gafatar, dan 10 keluarga deportan dan returni ISIS. Penelitian berlangsung dari Agustus 2017 sampai dengan Februari 2018.

Temuan Utama

Belajar dari Mereka yang Terlibat

Anggota NII maupun Gafatar sebelumnya bergabung karena mengetahui atau diajak oleh orang terdekat seperti teman, saudara, atau guru. Pola ini sebenarnya menjadi pola umum alasan seseorang bergabung dengan sebuah kelompok. Dalam bahasa Marc Sageman, model ini dalam kasus Al-Qaeda disebut sebagai *social affiliation* (afiliasi sosial) dengan bentuk *friendship* (pertemanan), *kinship* (kekerabatan), dan *discipleship* (hubungan guru-murid).¹

Pola semacam ini agak berbeda dari alasan mengapa orang bergabung dengan ISIS, dimana faktor utamanya adalah pengaruh media, khususnya media sosial. Hal ini diungkapkan oleh Nurshadrina. Alasan dia datang ke Suriah lantaran tertarik dengan narasi hijrah dan khilafah Islam di Suriah yang disebar di media sosial. Nursahdrina adalah satu dari 18 returni yang berhasil kembali ke Indonesia setelah melarikan diri dari ISIS pada 2017. Nur merupakan anak kedua dari pasangan Joko Wiwoho dan Ratna Nirmala. Sang ayah, Joko Wiwoho merupakan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan (BP) Batam. Nur terpaksa berhenti sekolah ketika kelas 2 SMA karena memutuskan hijrah ke Suriah.²

Nur mengatakan, ia sering membaca di situs web yang menyampaikan perintah bahwa umat Muslim wajib berhijrah menuju bumi Syam yang diberkati. Impian untuk mendapatkan kehidupan yang terjamin seperti pada masa khilafah yang dijalani Rasulullah juga menjadi pendorong dirinya dan keluarga hijrah ke Suriah. Nur menjelaskan bahwa motif kepindahannya beserta keluarga ke Suriah karena tergiur janji-janji kemakmuran yang dipropagandakan, seperti kehidupan yang serba gratis, tenteram dan layak. Nur juga meyakini bahwa bumi Syam (wilayah Suriah dan sekitarnya) adalah negeri yang diberkati. Selain sebagai tempat turunnya Imam Mahdi, negeri Syam adalah negeri yang menerapkan syariat Islam sehingga peluang menjalani kehidupan Islami yang paripurna di bawah payung kekhalifahan dapat diterapkan.³

1 Marc Sageman, *Understanding Terror Networks* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004), h. 107-119.

2 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Nurshadrina pada 20 Oktober 2017 di Depok, Jawa Barat.

3 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Nurshadrina pada 20

Media sosial memiliki daya tarik yang kuat untuk memengaruhi seseorang dan dijadikan salah satu alat utama untuk memperkenalkan ideologi ISIS oleh kelompok tersebut. Kasus yang dialami Ade Ahmad alias Abu Daud alias Abu Marwah menggambarkan hal ini. Ade ditangkap pada 8 Januari 2016 di sebuah rumah di Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara oleh Densus 88. Dia terlibat pelemparan bom Molotov ke mobil minibus berlogo TV One pada perayaan malam tahun baru 2016 di alun-alun Bandung. Ade lahir di Bandung, 17 Januari 1967. Awal 2014, Ade mengikuti pemberitaan tentang konflik di Timur Tengah, khususnya berita mengenai berdirinya sebuah khilafah Islam di Suriah. Dia lalu mulai bergabung dengan akun grup di Facebook yang membahas khilafah di Suriah dan akhirnya berteman dengan sesama pengguna Facebook yang mendukung berdirinya khilafah. Dalam akun grup tersebut, Ade terlibat pembahasan tentang konflik di Timur Tengah, pembentukan Daulah Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Bagdadi, tentang hijrah ke Suriah dan jihad di Suriah.⁴

NII seringkali menggunakan janji kehidupan akhirat dalam proses rekrutmennya. Konsep surga yang dijanjikan perekrut NII misalnya, sangat menyihir mereka yang pemahaman keislamannya minim. Hal ini dialami oleh Agus Dedi alias Ahmad Shodiq. Agus adalah mantan aktivis NII KW9. Dia masuk NII karena direkrut oleh temannya pada 1992. Saat itu, Agus dikenal sebagai preman yang hobi berkelahi. Janji surga yang harus ditempuh dengan jalan jihad menjadi pencerahan yang ingin segera dia aplikasikan untuk menebus semua dosanya. Sebagai bentuk komitmen, dia memberikan infak dan sedekah setiap bulan untuk membangun NII.⁵

Kasus deportan ISIS mengisahkan hal lain. Mereka yang hendak bergabung dengan ISIS hanya karena awamnya agama. Hal ini diungkapkan oleh Ahbar Muzakir.⁶ Ahbar mengatakan rencana perjalanan hijrahnya ke Suria untuk bergabung dengan kelompok esktrēm itu diyakininya berdasarkan dari hadis-hadis akhir zaman, seperti *ya'tu 'al aika bil syam*, yang artinya pergilah kalian ke Syam.

Meski gagal hijrah ke Suriah, Ahbar meyakini bahwa niatnya sudah dicatat oleh Allah sebagai amalan ibadah. Ahbar mengatakan bila ada peluang untuk menjadi relawan kembali, dirinya akan mendaftar.⁷

Berbeda lagi dengan proses rekrutmen para mantan Gafatar. Selain diajak teman dekatnya, mereka tertarik dengan aktivitas Gafatar yang berpusat pada aspek ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Rudi Handoko dan Muhammad Syamsudin misalnya, bergabung menjadi anggota Gafatar atas ajakan temannya. Sebelum masuk Gafatar, Rudi adalah seorang pedagang makanan keliling di sekitar sekolah-sekolah. Dia merantau ke Kalimantan Barat sebab dijanjikan akan adanya tanah yang dapat ia gunakan untuk bercocok tanam. Bermodalkan uang sepuluh juta hasil menjual beberapa properti berharga miliknya, ia pergi dengan membawa serta istri dan kedua anaknya. Bersama anggota Gafatar lain dari Kabupaten Bogor, ia ditempatkan di Desa Landak Kecamatan Ngabang. Aktivitas pertamanya ialah membuka lahan untuk bercocok tanam padi dan berbagai macam sayuran. Namun, sebelum menikmati masa panen raya, ia sudah dipulangkan oleh pemerintah akibat kerusuhan di daerah Mempawah. Dia bahkan sudah mempunyai KTP Kalimantan Barat.⁸

Sedangkan Muhammad Syamsudin pergi ke Kalimantan Timur untuk membuka usaha jasa interior mobil. Ia lalu bertemu dengan seorang anggota Gafatar yang berprofesi dosen dan tertarik untuk masuk organisasi tersebut. Alasannya, program-programnya aktif dalam rangka kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Akhirnya, ia pun diminta untuk menjadi ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) di Samarinda, Kalimantan Timur.⁹ Pada awal 2016, ia dipulangkan secara serentak oleh pemerintah akibat kerusuhan di Mempawah. Padahal saat itu, usaha jasa interiornya sudah berkembang pesat dan telah memiliki beberapa aset tanah di Kalimantan Timur. Pada waktu kepulangannya, ia disidang oleh pihak kelurahan dan disuruh untuk membaca ulang dua kalimat syahadat. Sampai saat ini, ia masih percaya dengan ajaran Gafatar karena menurutnya tidak

Oktober 2017 di Depok, Jawa Barat.

4 Dokumen Surat dakwaan atas nama Ade Ahmad alias Abu Daud alias Abu Marwah (Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Mei 2016)

5 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Agus Dedi alias Ahmad Shodiq pada 28 September 2017 di Bandung, Jawa Barat.

6 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Ahbar Muzakir pada 4 Oktober 2017 di Bogor, Jawa Barat.

7 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Ahbar Muzakir pada 4 Oktober 2017 di Bogor, Jawa Barat.

8 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Rudi Handoko pada 4 Oktober 2017 di Bogor, Jawa Barat.

9 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Muhammad Syamsudin pada 4 Oktober 2017 di Bogor, Jawa Barat.

bertentangan dengan ideologi Pancasila.¹⁰

Belajar dari Mereka yang Keluar

Salah satu faktor pendorong para aktivis NII keluar dari organisasi mereka adalah lantaran kecewa dengan perilaku pemimpinnya dan anggapan tentang penyelewengan syariat agama. Kekecewaan (*disillusionment*) ini dalam istilah John Horgan disebut sebagai *psychological disengagement* dimana seseorang keluar karena kecewa sebab fakta yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Horgan memberikan contoh seorang aktivis Jemaah Islamiyah, Nasir Abbas yang keluar dari organisasinya karena kecewa dengan tindakan kelompoknya yang menyerang orang-orang tidak bersalah.¹¹ Penting dicatat bahwa ketika mereka keluar dari NII, bukan berarti mereka kemudian bergabung dengan kelompok moderat. Banyak kasus pula justru menunjukan banyak dari mereka yang keluar dari NII kemudian terlibat dalam jaringan terorisme.

Tidak ada faktor kekecewaan yang melandasi orang keluar dari Gafatar. Secara umum, mereka justru kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang mengevakuasi mereka dari Kalimantan. Mereka juga kecewa terhadap fatwa sesat MUI yang tidak menunjukkan adanya proses tabayun terhadap Gafatar sebelum mengeluarkan fatwa tersebut. Suparta, salah satu responden yang sudah setahun lebih tinggal bersama komunitas Gafatar di Kalimantan Barat, merasa hidupnya secara ekonomi dan sosial jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Usaha peternakannya ketika di Kalimantan Barat bersama Gafatar mengalami perbaikan dan peningkatan.¹² Responden lainnya, Agus Supriyadi, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dalam Gafatar karena tidak ada nilai ataupun ajaran anti Pancasila. Selain itu, kampanye kegiatannya hanya seputar ketahanan pangan yang menurut Agus, justru membantu pemerintah Indonesia.¹³

Selanjutnya, untuk kasus deportan, tidak ada yang menyatakan kecewa terhadap kelompok ISIS. Bahkan, mereka masih punya keinginan untuk hijrah dan hidup di bawah naungan Islam.

Sementara returni menyatakan kecewa terhadap ISIS karena gambaran di media sosial tidak sesuai dengan realita yang mereka temui di negeri Syam. Adnan Ruswandi, misalnya, mengatakan bahwa yang terpenting ia sudah berniat untuk hijrah dan memiliki keinginan untuk tinggal di bawah naungan khilafah.¹⁴ Dibandingkan returni, para deportan masih memiliki ideologi kuat tentang dukungannya terhadap ISIS. Hal ini didukung dengan fakta adanya tiga deportan yang pernah mendapatkan program rehabilitasi dari pemerintah Indonesia namun kemudian ditangkap oleh Densus 88 karena sedang merencanakan aksi terorisme.

Nurshadrina adalah salah seorang returni yang menjadi responden penelitian. Ia dan keluarganya hijrah sebab menerima kabar dari internet, bahwa bila tinggal di bawah naungan ISIS kehidupan akan serba gratis dan diberkati sebagaimana pada masa Nabi Muhammad. Namun setelah sampai di sana, ia menemukan kehidupan yang jauh dari andai. Dia dan keluarganya lantas memutuskan keluar dari wilayah ISIS dan kembali ke Indonesia.¹⁵

Dalam strategi penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan nonkekerasan, penting untuk diketahui oleh pemangku kebijakan untuk belajar dari mereka yang keluar dengan meninjau dari kondisi kekecewaan mereka terhadap kelompok yang mereka ikuti sebelumnya. Kondisi ini bisa dijadikan asesmen awal bagi pemerintah serta BNPT. Hasil riset melalui wawancara dengan banyak responden menunjukkan bahwa orang yang mengalami kekecewaan terhadap kelompoknya jauh lebih mudah mengikuti program deradikalisasi ketimbang yang belum mengalami kekecewaan. Mereka yang kecewa artinya sudah keluar dari kelompoknya atau opininya sudah bertransformasi sehingga kemudian dapat mudah dirubah pula sikap dan perilakunya. Sementara mereka yang belum mengalami kekecewaan artinya ideologi kelompok tersebut masih melekat dalam diri mereka dan masih besar kemungkinan tetap mereka percayai. Ketika seseorang keluar dari kelompoknya itulah, proses deradikalisasi jelas diperlukan untuk membimbing mereka kepada nilai-nilai keagamaan yang moderat.

10 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Muhammad Syamsudin pada 4 Oktober 2017 di Bogor, Jawa Barat.

11 Tore Bjorgo dan John Horgan (eds.), *Individual Disengagement: A Psychological Analysis dalam Leaving Terrorism Behin: Individual and Collective Disengagement*, (New York: Routledge 2009) h. 20-23.

12 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Suparta pada 5 Oktober 2017 di Bogor, Jawa Barat.

13 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Agus Supriyadi pada 6 Oktober 2017 di Bogor, Jawa Barat.

14 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Adnan Ruswandi pada 6 Oktober 2017 di Bogor, Jawa Barat.

15 Hasil wawancara Tim Peneliti IMCC dengan Nurshadrina pada 20 Oktober 2017 di Depok, Jawa Barat.

Respon dan Tanggapan Atas NII, Gafatar dan ISIS

Sejauh ini, pemerintah hanya melakukan respon tanggap darurat terhadap masalah-masalah seperti tersebut di atas. Pemerintah seolah baru bertindak setelah terjadinya suatu kasus atau peristiwa, sementara aspek pencegahannya atau keberlanjutan dari sebuah respon tanggap darurat masih belum menjadi prioritas. Salah satu contoh hasil respon tanggap darurat yang baik misalnya dapat menghasilkan UU Terorisme pada 2003 pasca bom Bali 12 Oktober 2002. Namun selain itu, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi untuk menangani gerakan terorisme global, seperti munculnya kelompok ISIS yang menyisakan sejumlah persoalan di Indonesia seperti *terrorist foreign fighter* (teroris yang beroperasi di negara lain), *homegrown terrorism* (teroris lokal) dan *lonewolf terrorism* (teroris yang bekerja sendiri).

Klaim terhadap suatu kelompok tertentu dalam skala nasional oleh sebuah organisasi mitra pemerintah, dalam hal ini fatwa MUI terhadap Gafatar yang dinyatakan sesat, tidak dapat dipungkiri menjadi pemicu berkembangnya persoalan dan memunculkan kekerasan terhadap anggota Gafatar. Ketika MUI menyatakan bahwa Gafatar adalah aliran sesat, maka serentak anggota Gafatar menjadi sasaran kekerasan oleh masyarakat sipil lainnya. Oleh karena itu, untuk mencegah fatwa tersebut menjadi sasaran kekerasan orang atau kelompok tertentu, perlu ada transparansi dalam pembuatan fatwa oleh MUI dan adanya fatwa pembeding dari organisasi Islam lain yang juga cukup representatif di Indonesia semisal NU dan Muhammadiyah. NU memiliki mekanisme mengeluarkan pandangan keagamaan yang bernama Bahtsul Masail, sementara Muhammadiyah memiliki lembaga fatwa yang disebut sebagai lembaga Tarjih. Adanya fatwa pembeding menjadi penting, karena memutuskan perkara dalam hukum Islam tidaklah mudah dan seringkali memunculkan banyak perbedaan pendapat. Maka penting bagi para penegak hukum untuk tidak menggunakan fatwa MUI sebagai dasar hukum nasional tunggal dalam memutuskan sebuah perkara. Penting dicatat bahwa fatwa MUI bukanlah dasar dari hukum di Indonesia. Oleh karena itu, para penegak hukum tidak bisa membuat keputusan dari dasar fatwa tersebut.

Salah satu persoalan utama dalam masalah ini, khususnya NII dan ISIS adalah kurangnya pemahaman yang luas soal cara beragama. Belajar dari mereka yang keluar dan juga memberikan jalan, kesempatan dan wawasan yang luas kepada para mantan NII dan ISIS harus menjadi prioritas. Mayoritas mantan aktivis NII menyatakan yakin dan tengah menempuh jalan yang benar ketika memutuskan untuk keluar dari kelompoknya setelah mendapatkan perspektif yang lebih luas dari banyak aspek antara lain tokoh agama, dan teman-teman lain. Demikian halnya dengan pentingnya menyodorkan fakta-fakta yang bisa dilihatnya (proses disonansi kognisi).

Yang juga penting untuk dijadikan media di sini adalah program reintegrasi atau rehabilitasi melalui pesantren moderat. IMCC melakukan intervensi untuk return di pesantren Al-Hikam Depok, Jawa Barat, sebuah pesantren yang dibangun oleh almarhum KH Hasyim Muzadi, tokoh Islam moderat terkemuka. Cara ini dinilai cukup efektif dalam memberikan perspektif kepada mereka tentang betapa luasnya ajaran Islam. Dari testimoni para peserta mengatakan program menginap di pesantren ini setidaknya turut menguatkan keyakinan mereka tentang keputusannya keluar dari kelompok sebelumnya.

Sejauh ini, pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan belum terintegrasi dalam penanganan kelompok radikal dan ekstremisme. Pesantren pada umumnya hanya menyediakan pendidikan agama namun tidak menyediakan cukup ruang untuk mereka yang ingin melakukan refleksi diri, tobat atau proses hijrah. Maka seharusnya pesantren mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari pemerintah untuk memfasilitasi terbentuknya pesantren yang mengajarkan Islam moderat dengan tujuan spesifik yakni untuk memperkuat program reintegrasi kebangsaan bagi mereka yang pernah terpapar ideologi ekstremisme dan terorisme.

Penting kiranya untuk mendorong, memperkuat, dan mengembangkan apa yang sudah dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil salah satunya Wahid Foundation yang sudah melakukan program kampung damai di beberapa wilayah di Indonesia.¹⁶ Program ini bisa jadi efektif

¹⁶ "Wahid Foundation Inisiasi Pembentukan Kampung Damai," (Republika, 9 September 2017) diakses melalui: <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/09/08/ovy-xsk-wahid-foundation-inisiasi-pembentukan-kampung-damai>

untuk mencegah mereka yang belum masuk ke dalam kelompok eksklusif. Selain itu, penting pula untuk mengintegrasikan program dengan keberlangsungan ekonomi sebuah komunitas dengan kampungnya. Pengalaman *best practice* dari suatu daerah yang pernah dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil penting disebarkan ke daerah lainnya. Pemerintah dalam hal ini perlu menentukan standarisasi kampung yang sukses (maju) yang mana salah satu aspeknya mencirikan keberagaman dengan penguatan toleransi dan menguatkan nilai-nilai perdamaian.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil riset para mantan NII, Gafatar dan ISIS ini menjadi perhatian bagi institusi negara seperti BNPT, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan para penegak hukum.

BNPT perlu menempuh dua mekanisme penting dalam mengkaji sebuah kelompok. Pertama dengan menggunakan asesmen awal antara orang yang dikecewakan oleh kelompoknya yang kemudian memutuskan keluar dari kelompoknya. Kedua dengan mereka yang belum menyatakan kecewa sehingga masih meyakini ideologi kelompoknya. Dari dua aspek tersebut, yang paling efektif dan diutamakan untuk program

deradikalisasi adalah kelompok yang sudah mengalami kekecewaan terhadap kelompoknya.

Sementara orang yang belum merasakan proses kekecewaan perlu ada pendekatan lain. Kementerian Agama dan Kementerian Sosial dapat berperan besar dalam melakukan pendekatan pada orang yang belum merasakan proses kekecewaan dengan cara melakukan disonansi kognisi yakni bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak seburuk apa yang mereka bayangkan.

Kementerian Sosial dan Kementerian Agama perlu menggandeng pesantren untuk memainkan peran dalam program rehabilitasi dan reintegrasi, khususnya bagi para mantan aktivis ISIS. Sejauh ini, pesantren belum dilihat sebagai lembaga yang terintegrasi dalam penanganan kelompok pro-kekerasan atas nama agama.

Kelompok masyarakat sipil perlu berperan dan terlibat aktif dalam penanganan masalah-masalah pencegahan dan penanganan radikalisme. Penting juga disorot bahwa tidak hanya berbicara soal program kampung damai dengan rangkaian kognisi tetapi juga diintegrasikan dengan keberlangsungan ekonomi sebuah komunitas dan kampungnya. Pemerintah perlu merumuskan konsep yang bisa diterapkan tentang kampung yang sukses (maju), dimana salah satu unsurnya mencirikan keberagaman Indonesia. Hal ini bisa ditempuh di antaranya dengan kerjasama melalui program Kemendes (Kementerian Desa).



Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



Empowered lives.
Resilient nations.